

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Koopetisi Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Lampung Selatan

Dedy Hermawan^a dan Simon Sumanjoyo Hutagalung^b

^{ab} Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

e-mail : ^a simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id, ^b dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas hasil pengujian model koopetisi dalam mengelola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Pengujian dilakukan terhadap konsep model pemberdayaan masyarakat dalam pendekatan koopetisi. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran (kombinasi kualitatif dan kuantitatif) dengan mensurvei 100 responden, wawancara, observasi dan diskusi kelompok terfokus. Data survei dianalisis secara kuantitatif dengan SPSS dan MS.Excel sehingga mampu menunjukkan perubahan sikap responden terhadap model intervensi. Sedangkan data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif. Hasil diseminasi model mengidentifikasi bahwa: (1). Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang model koopetisi, (2). Sikap masyarakat mendukung penerapan model yang mengadopsi konsep kerjasama dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: destinasi pariwisata; pemberdayaan masyarakat; manajemen pariwisata

Community Empowerment through a Coopetition Model in the Management of Tourism Destinations in South Lampung

Abstract

This article discusses the results of testing the coopetition model in managing community participation in tourism management. Tests were carried out on the concept of community empowerment models in the coopetition approach. This research was conducted using a mixed method (a combination of qualitative and quantitative) by surveying 100 respondents, interviews, observation and focus group discussions. The survey data were analyzed quantitatively with SPSS and MS.Excel so that they were able to show changes in respondents' attitudes towards the intervention model. While the qualitative data will be analyzed using interactive analysis methods. The results of the model dissemination identified that: (1). The community has a good understanding of the coopetition model, (2). The attitude of the community supports the application of a model that adopts the concept of cooperation in the aspect of community empowerment.

Keywords: tourism destinations; community development; tourism management

A. PENDAHULUAN

Tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan di daerah tujuan wisata manapun, ternyata masyarakat pedesaan di Kawasan Destinasi Wisata Lampung Selatan mengalami masalah serupa yaitu tidak mampu terciptanya keterpaduan kerjasama yang saling menguatkan, tidak sekedar menguntungkan sekelompok aktor. Meski ada tekanan motif ekonomi, warga desa masih

kesulitan mengelola potensi destinasi wisata di wilayahnya sebagai sumber penghidupan dasar. Demikian pula penelitian lain mengungkapkan kontribusi destinasi wisata di kawasan wisata terhadap peningkatan pendapatan sebagian besar masyarakat desa, terutama pengelola yang relatif rendah (Amaro & Duarte, 2015).

Industri pariwisata memegang peranan penting dalam upaya pembangunan dan pembangunan suatu daerah. Di banyak daerah,

industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Kerjasama bisnis dalam pengelolaan pariwisata daerah dilakukan antara pemerintah daerah dengan masyarakat luas bertujuan agar berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah dan destinasi wisatanya menjadi modal dasar pengembangan pariwisata (Nunkoo, 2017). Kegiatan investasi pariwisata daerah harus didukung oleh suatu aturan yang mampu menciptakan fairness, fairness, efisiensi, kepastian hukum, dan ketentraman yang menjadi asas hukum di negara yang modern, khususnya untuk bidang kerjasama pariwisata khususnya di bidang regional. Pengelolaan pariwisata dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (Bello et al., 2017). Permasalahan hukum yang terdapat dalam kerjasama usaha pengelolaan pariwisata antara lain mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam upaya pengelolaan pariwisata daerah, karena adanya undang-undang perjanjian kerjasama usaha pengelolaan pariwisata daerah dan mengenai faktor penghambat dan penyelesaian masalah. Upaya kerjasama bisnis pengelolaan pariwisata daerah dilakukan (Budeanu et al., 2016).

Peran Pemerintah Daerah di bidang pariwisata berpedoman pada Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus kewenangan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya dapat mengatur, mengarahkan, mengendalikan sekaligus melindungi masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya buatan (Junaedi, 2018). Pembangunan pariwisata diupayakan untuk dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan daerah, fokus pada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek termasuk kerjasama bisnis manajemen (Lestari et al., 2016). Pemerintah daerah harus dapat memposisikan pariwisata dalam kerangka pembangunan pariwisata dengan diimbangi dengan perencanaan dan

pengelolaan pariwisata yang baik serta upaya peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas (Pratama & Wijaya, 2018).

Berbagai faktor yang melatarbelakangi permasalahan lemahnya pembangunan kerjasama antar pelaku dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis sumber daya lokal. Hubungan antara aktor yang kurang komunikatif dengan berbagai pihak menjadi salah satu penyebab warga desa sulit memanfaatkan perkembangan destinasi wisata di lingkungannya (Dahles, 1998). Sederet masalah yang dikemukakan menjadi dasar pertimbangan penentuan tema penelitian yaitu tentang hubungan antar pelaku dalam penyebaran model kooperasi masyarakat desa melalui pengelolaan destinasi wisata (Divisekera & Nguyen, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan, solusi dan berfungsinya hubungan antar aktor dalam diseminasi model kooperasi melalui pengelolaan destinasi wisata berbasis sumberdaya lokal.

Penelitian sebelumnya tentang model pengelolaan destinasi pariwisata dapat mengadopsi konsep kooperasi dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pelaku pariwisata lainnya. Model tersebut merangkum prasyarat dalam konsep kooperasi dan identifikasi empat strategi dalam implementasinya. Partisipasi yang teridentifikasi di lokasi penelitian dirasa lebih tepat jika diintervensi melalui model ini, hal ini juga telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di wilayah studi (Chim-Miki & Batista-Canino, 2017). Model tersebut dimulai dengan prasyarat kepercayaan dalam membangun kooperasi. Beberapa ulama menyatakan bahwa kepercayaan adalah dasar kerjasama, ia juga menekankan bahwa pertukaran relasional (hubungan timbal balik) tidak dapat berjalan tanpa adanya kepercayaan. Namun para ahli lain menyatakan ketidakpercayaan yang menjadi dasar dari hubungan / pertukaran relasional, karena tidak percaya mereka bekerja sama untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (Czernek & Czakon, 2016). Kepercayaan juga dapat diartikan sebagai sikap yang berkaitan dengan risiko dalam suatu hubungan, sehingga tingkat kepercayaan akan sangat bergantung pada tingkat kemungkinan untung atau rugi (Nunkoo & Gursoy, 2016). Pengertian ini berarti kepercayaan akan semakin

baik jika ada batasan-batasan, kemungkinan untung atau rugi dari suatu hubungan. Jika resiko kerugian meningkat maka tingkat kepercayaan akan menurun, namun sebaliknya jika terdapat banyak keuntungan atau resiko kerugian kecil dari suatu hubungan maka tingkat kepercayaan akan meningkat bahkan semakin tinggi. Konsep dasar kepercayaan dapat diartikan bahwa kepercayaan merupakan hasil dari persepsi kebajikan / kepedulian pihak yang dipercaya, menekankan sejauh mana pihak terpercaya akan memperhatikan kesejahteraan atau kelangsungan usaha dari pihak pemberi amanah (Nunkoo, 2017). Dalam konteks pengelolaan pariwisata, kepercayaan adalah kepercayaan para wali atas tindakan yang akan datang yang memberikan hasil positif dan tidak akan melakukan tindakan negatif yang merugikan pihak pemberi kepercayaan. Pengujian model merupakan salah satu tahapan penting yang dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat termasuk yang bermukim di kawasan desa tujuan wisata Lampung Selatan. Kegiatan diseminasi dalam penelitian ini merupakan proses penyebaran informasi model koopetisi yang berorientasi

dengan memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya lokal. Tujuan model diseminasi dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat desa sebagai subjek sekaligus kelompok sasaran pemberdayaan agar mau menerapkan berbagai kegiatan produktif dan kreatif yang terdapat dalam model materi koopetisi. Sosialisasi juga memberikan ruang gerak bagi masyarakat desa di daerah tujuan wisata untuk berperan aktif dalam menyatukan kebutuhan strategis dan permasalahan nyata dalam upaya mencari alternatif solusi yang lebih tepat dan tepat sasaran.

B. PEMBAHASAN

Pada bagian ini ditemukan temuan tentang laju perubahan yang terjadi pada responden kajian tentang substansi model yang diusulkan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan destinasi wisata. Pada bagian ini dianalisis derajat perubahan pengetahuan dan identifikasi kualitatif yang menjelaskan peristiwa perubahan tersebut. Secara ringkas, identifikasi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Derajat Perubahan Persepsi Stakeholder Terhadap Model

No	Komponen	Perubahan Perilaku	Derajat Perubahan
1	Menilai kebutuhan untuk penyebaran informasi model koopetisi.	Perubahan pengetahuan dan sikap responsif dan ingin tahu struktur dan isi model. Beberapa informan secara aktif mendiskusikan kelayakan serius dari fungsionalitas beberapa elemen pembuat model.	30%
2	Memahami struktur dan isi model koopetisi.	Peningkatan pengetahuan dan sikap tentang fungsionalitas dan khasiat setiap elemen perumusan model struktur pembangun.	35%
3	Menilai keuntungan dan kerugian dari model koopetisi.	Kelebihan dan kelebihan model dideteksi dengan bijak oleh informan. Proyeksi media cetak dan lisan untuk promosi dan peningkatan komunikasi bisnis produktif dalam pengelolaan destinasi wisata ramah lingkungan.	25%
4	Menguji selektivitas dan daya kritis masyarakat terhadap struktur model dan isi Model	Informan yang mewakili kepentingan masyarakat pedesaan di daerah tujuan wisata sebagian dapat menilai secara kritis dan dapat merespon isi yang terdapat dalam rumusan model. Mereka juga secara aktif memberikan berbagai kritik dan revisi yang membangun kelayakan fungsionalitas model.	30%

5	Menguji manfaat praktis dan teoritis model koopetisi bagi manajemen dan pihak swasta	Ada beberapa informan yang mewakili masyarakat yang telah mencoba model tersebut secara parsial. Meski belum sepenuhnya namun keunggulan model tersebut sudah teruji secara praktis..	15%
6	Menguji kesesuaian model koopetisi dengan nilai dan norma sosial masyarakat	Menerapkan dan adaptif terhadap fleksibilitas rumusan model sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan serta reaksi penerimaan lingkungan sosial di kawasan tujuan wisata..	22%
7	Menemukan umpan balik publik tentang formulasi model umpan balik.	Umpan balik sebagian positif dan sebagian lainnya negatif. Umpan balik negatif dianggap merevisi rumusan model. Umpan balik mata pencaharian dilakukan dengan menerapkan media komunikasi dan kontak pribadi.	28%

Sumber: Analisis Data, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa komponen memiliki derajat perubahan yang tinggi dan pada beberapa aspek lainnya memiliki derajat perubahan yang rendah. Dalam komponen struktur dan isi model, kebutuhan akan model dan selektivitas masyarakat mencapai nilai rerata 30%. Pada komponen kebutuhan model dapat dipahami porsi yang cukup besar didasarkan pada kesamaan persepsi solusi yang ditawarkan oleh model dan pada komponen selektivitas masyarakat terhadap model tersebut ditentukan oleh deskripsi model yang relevan dengan kegiatan. kelompok pelaku pengelolaan destinasi wisata sehingga mampu menilai secara obyektif. Sedangkan derajat perubahan terendah terjadi pada komponen manfaat praktis dan teoritis model. Hal ini dikarenakan kelompok pelaku belum dapat mencoba penerapan model ini secara keseluruhan dan belum banyak diketahui manfaat apa yang disajikan dari penerapannya.

Bentuk interaksi antar pelaku dalam pengelolaan destinasi wisata ini dapat menimbulkan proses sosial asosiatif dan disosiatif. Bentuk proses sosial asosiatif dicirikan menurut kedekatannya menggunakan kerjasama sedangkan proses sosial disosiatif dicirikan dalam bentuk peristiwa kontradiksi dan konflik (Ratner et al., 2018). Kedua realitas tersebut saling melengkapi, sehingga aspek dinamika warga di destinasi wisata dapat terungkap secara lebih natural, seimbang dan tidak hanya satu sisi tetapi dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Penjelasan menurut kedua proses tersebut cenderung terjadi interaksi yang kontradiktif yang di satu sisi berpotensi menimbulkan suasana yang serasi tetapi di sisi lain menimbulkan konflik. Dalam

interaksi antar aktor, antar lapisan dan antar level atau bahkan antar subkultur banyak fenomena yang dapat terjadi. Jika dianalisis menggunakan kerangka berpikir positivisme maka sistem sosial secara teratur mengarah pada titik kestabilan dan setiap pelaku sosial memiliki kesempatan untuk melakukan adaptasi sosial (Hatipoglu et al., 2016). Diperlukan reorganisasi, restrukturisasi dan perubahan sistem atau tatanan sosial lebih lanjut agar kembali seimbang. Orang yang berusaha menekuni kegiatan produktif dan kreatif di destinasi wisata tidak jarang mengalami kesulitan apalagi saat menghadapi kejadian negatif yang disebabkan oleh hal tersebut.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hasil pengujian model koopetisi dalam pemberdayaan masyarakat mengidentifikasi bahwa: (1). Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang model koopetisi, hal ini ditunjukkan dengan data survei yang menunjukkan tingkat perubahan pengetahuan sebesar 15-35%. (2). Masyarakat memiliki orientasi untuk mendukung penerapan model yang mengadopsi konsep kerjasama dalam aspek pemberdayaan masyarakat ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa solusi yang ditawarkan oleh stakeholder group untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah mendanai penelitian ini melalui Skema Penelitian Pendidikan Tinggi, khususnya skema PTUPT. Selain itu kami juga berterima kasih kepada

lembaga penelitian Universitas Lampung atas dukungan administrasi dan kelembagaan.

REFERENSI

- Amaro, S., & Duarte, P. (2015). An integrative model of consumers' intentions to purchase travel online. *Tourism Management*, 46, 64–79. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.006>
- Amerta, I. M. S. (2017). The Role of Tourism Stakeholders at Jasri Tourism Village Development, Karangasem Regency. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 20–28.
- Begum, H., Er, A. C., Alam, A. S. A. F., & Sahazali, N. (2014). Tourist's Perceptions towards the Role of Stakeholders in Sustainable Tourism. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, 313–321. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.301>
- Bello, F. G., Lovelock, B., & Carr, N. (2017). Constraints of community participation in protected area-based tourism planning: The case of Malawi. *Journal of Ecotourism*, 16(2), 131–151. <https://doi.org/10.1080/14724049.2016.1251444>
- Budeanu, A., Miller, G., Moscardo, G., & Ooi, C.-S. (2016). Sustainable tourism, progress, challenges and opportunities: An introduction. *Journal of Cleaner Production*, 111, 285–294. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.027>
- Camilleri, M. A. (2018). The Tourism Industry: An Overview. In M. A. Camilleri (Ed.), *Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product: An Introduction to Theory and Practice* (pp. 3–27). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49849-2_1
- Chen, J. S. (2015). Tourism stakeholders attitudes toward sustainable development: A case in the Arctic. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 22, 225–230. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.08.003>
- Chim-Miki, A. F., & Batista-Canino, R. M. (2017). Tourism cooptation: An introduction to the subject and a research agenda. *International Business Review*, 26(6), 1208–1217. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.05.003>
- Czernek, K., & Czakon, W. (2016). Trust-building processes in tourist cooptation: The case of a Polish region. *Tourism Management*, 52, 380–394. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.009>
- Dahles, H. (1998). Tourism, Government Policy, and Petty Entrepreneurs in Indonesia. *South East Asia Research*, 6(1), 73–98. <https://doi.org/10.1177/0967828X9800600105>
- Divisekera, S., & Nguyen, V. K. (2018). Determinants of innovation in tourism evidence from Australia. *Tourism Management*, 67, 157–167. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.01.010>
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). DIGITAL INOVASI SEKTOR PUBLIK: EFEKTIVITAS KOLABORASI DALAM IMPLEMENTASI INOVASI DEGA DIGITAL. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(2), 127–145. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Fine, J. (2017). Enforcing Labor Standards in Partnership with Civil Society: Can Co-enforcement Succeed Where the State Alone Has Failed? *Politics & Society*, 45(3), 359–388. <https://doi.org/10.1177/0032329217702603>
- Fulton, E. A., Boschetti, F., Sporcic, M., Jones, T., Little, L. R., Dambacher, J. M., Gray, R., Scott, R., & Gorton, R. (2015). A multi-model approach to engaging stakeholder and modellers in complex environmental problems. *Environmental Science & Policy*, 48, 44–56. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.12.006>
- Harahap, S. H., Christiana, I., & Febriaty, H. (2019). Program kemitraan masyarakat: Penerapan website desa di Desa Tanjung Gusta dan Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sains Penelitian & Pengabdian*, 2(2), 54–60.
- Hatipoglu, B., Alvarez, M. D., & Ertuna, B. (2016). Barriers to stakeholder involvement in the planning of sustainable tourism: The case of the Thrace region in Turkey. *Journal of Cleaner Production*, 111, 306–317.

- <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.059>
- Junaedi, I. G. B. R. U. I. W. R. (2018). *Membangun Pariwisata Dari Desa: Desa Wisata Blimbingsari Jembrana Bali Usaha Transformasi Ekonomi*. Deepublish.
- Krutwaysho, O., & Bramwell, B. (2010). Tourism policy implementation and society. *Annals of Tourism Research*, 37(3), 670–691. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.12.004>
- Kumar, J., & Hussain, K. (2014). Evaluating Tourism's Economic Effects: Comparison of Different Approaches. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, 360–365. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.305>
- Lestari, G., Armawi, A., & Muhamad, M. (2016). Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 137–157. <https://doi.org/10.22146/jkn.17302>
- Lin, D., & Simmons, D. (2017). Structured inter-network collaboration: Public participation in tourism planning in Southern China. *Tourism Management*, 63, 315–328. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.024>
- Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? *Journal of Destination Marketing & Management*, 6(4), 277–285. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.10.003>
- Nunkoo, R., & Gursoy, D. (2016). Rethinking The Role of Power and Trust in Tourism Planning. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 25(4), 512–522. <https://doi.org/10.1080/19368623.2015.1019170>
- Pratama, E. R., & Wijaya, H. B. (2018). Peran Institusi Lokal Dalam Pengembangan Kegiatan Pariwisata Desa Giritengah Kabupaten Magelang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 7(2), 70–79.
- Ratner, B., Burnley, C., Mugisha, S., Madzudzo, E., Oeur, I., Mam, K., Rüttinger, L., Chilufya, L., & Adriázola, P. (2018). Investing in multi-stakeholder dialogue to address natural resource competition and conflict. *Development in Practice*, 28(6), 799–812. <https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1478950>
- Santosa, S. H., Prihatini, D., Purwanto, A., Jumiaty, A., & Susilo, D. (2016). PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR. *UNEJ E-Proceeding*, 601–611.